

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI MEDIASI DI DESA MENGANTI
KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

**MUHAMMAD YUSUF
112211053**

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

H. Drs. Eman Sulaeman, MH.

Tugurejo A. 3 Rt. 02/Rw. 01 Tugu Semarang

Rustam Dahar KAH, M.ag

Jl. Taman Jeruk III Bukit Jatisari Permai A-9 No.7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 eksempler
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr. Muhammad Yusuf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yusuf
Nim : 112211053
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI DI
DESA MENGANTI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN
JEPARA**


Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Maret 2017

Pembimbing I


H. Drs. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 196506051992031003

pembimbing II


Rustam Dahar KAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Yusuf
NIM : 112211053
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI DI DESA MENGANTI
KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA**

Telah dimuaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **5 April 2017.**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 5 April 2017

Ketua sidang/penguji

Drs. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Penguji I

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Sekretaris sidang/penguji

RUSTAM DAHAR KAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji II

Dr. ROKHMADI, M.Ag
NIP. 196606181994031002

Pembimbing II

RUSTAM DAHAR KAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005



MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya :. .. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Q.S Al. Maa'idah : 2)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Untuk ayah tercinta Sunarto dan Ibu tercinta Tuginah yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian yang tiada pernah henti, serta do'a restu yang selalu ananda harapkan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk ayah dan ibu. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara dan penyembuh semua kesedihan yang tercipta selama ananda menuntut ilmu. Ananda sangat bersyukur mempunyai kedua orang tua yang begitu menyayangi dan begitu sabar menghadapi ananda, terimakasih untuk segalanya.
2. Kakak tercinta Nanik Kurniawati yang senantiasa memberikan motivasi dan senyum kebahagiaan dan Rizki Wulandarai yang selalu menemani dan memberi semangat..
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Tiada kata yang dapat kuucapkan selain terima kasih, dan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih untuk semuanya.
4. Saudara-saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk selalu menyemangati dan mendoakanku selama berada dibangku perkuliahan. Mereka tempat pelipur lara dikala penat dengan semua aktivitas ini. Mereka adalah tempat tercurahnya kasih sayang, aku sangat bersyukur dapat terlahir di tengah-tengah kalian semua.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabat seangkatan Jinayah Siyasah 2011. Mahmudi, Lutfi, Fathi dll yang telah menemani perjuangan penulis selama 4 tahun lebih, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang demi gelar Sarjana Hukum, semangat berjuang demi masa depan kawan-kawan.
6. Anggota kontrakan Wismasari 4 no 10 (Fauzi, Udin, Ervan, Bidin, Haris, Harun, dan Lukman) yang telah menemani penulis selama 4 tahun lebih. Canda tawa, dukungan, dan saran-saran kalian selalu penulis ingat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Skripsi ini juga tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Februari 2017

Deklarator



Muhammad Yusuf
NIM. 112211053

ABSTRAK

Peristiwa yang terjadi di Desa Menganti pada tanggal 11 oktober 2012 sempat menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Pada waktu malam hari terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pria bernama Abdul Salam. Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Mediasi yang dihasilkan dengan menyatakan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan kakak intan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Rumusan masalah dalam skripsi ini, a) Bagaimana Proses Mediasi di Desa Menganti dalam Perspektif KUHP di Indonesia? b) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan?. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui wawancara maupun pengamatan (observasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara lebih memilih menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi. Ini menunjukkan masyarakat tidak bergantung dengan hukum konvensional yang tidak mementingkan keinginan kedua belah pihak. Mediasi pidana sendiri di Indonesia belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Akan tetapi mediasi sudah dikenal Islam sejak zaman Nabi. Hal ini sebagaimana dalam Hukum Islam apabila sudah adanya pemaafan dari korban maupun keluarganya maka penjatuhan hukuman pun tidak dilaksanakan. Mediasi merupakan cerminan bahwa masyarakat masih menggunakan cara musyawarah dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Cara damai ini bisa dirasakan lebih memberikan rasa puas terhadap pelaku dan korban. Penyelesaian melalui mediasi merupakan langkah untuk mencari sebuah keadilan dengan memberikan hak-hak kepada pelaku dan korban. Mediasi yang dilakukan di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara belum sesuai dengan sistem hukum positif

di Indonesia karena belum memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh KUHP, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan kaidah-kaidah islam karena mediasi yang dilaksanakan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat islam. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan tidak kalah, Mediasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi. Makna damai juga ditemukan dari kata Islam dan ditemukan dari misi totalitas ajaran Islam, yaitu menebarkan rahmat dan mewujudkan damai bagi seluruh alam.

Kata Kunci: Mediasi, Penganiayaan, Hukum Pidana Positif

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penguasa seluruh alam, Tuhan yang terus memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara” dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi panutan bagi seluruh umat, dan semoga kelak mendapatkan syafaatnya.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Wali Dosen dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas arahan, pengetahuan, dan bantuan yang diberikan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya mulai dari kebutuhan penulis baik moril maupun materiil, tenaga, motivasi, cinta, hingga do'a yang tak pernah terlewatkan setiap detikny sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Abdul Salam, Ali Wibowo, Bapak Bisri dan Kepala desa Menganti yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 25 Februari 2017

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM. 112211053

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN MEDIASI

A. Pengertian Mediasi	25
B. Prinsip Mediasi	45
C. Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan	65

**BAB III PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DESA MENGANTI**

A. Profil Desa Menganti	71
B. Kronologi Kasus Penganiayaan di Desa Menganti	77
C. Pelaksanaan Mediasi di Desa Menganti	80

**BAB IV ANALISIS MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DESA
MENGANTI**

A. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di Desa Menganti	87
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi	96

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun, putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas suatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak atas suatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang

akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.¹

Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan tidak kalah. Mediasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.²

Penyelesaian di luar pengadilan ini dinilai memberikan dampak positif yaitu: (i) memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya, (ii) tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya, (iii) menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan

¹Syahrizal Abas, *Mediasi: dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: kencana, 2011), hlm x

²*Ibid.*, hlm xi

tidak mengabaikan keadilan bagi korban, dan (iv) membantu aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelesaikan sengketa, terlebih jika sengketa terjadi di wilayah yang secara geografis berada di pedalaman. Selain keempat hal tersebut penyelesaian di luar pengadilan dilatarbelakangi pula dengan tujuan untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan.³

Salah satu penyebab buruk reputasi itu adalah kinerja aparat hukum yang kurang baik, dilihat dari segi etika atau moral maupun dari segi integrasi terhadap kerja. Akibatnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak tercapai sehingga terjadilah penumpukan perkara di semua tingkat peradilan. Akibat lainnya, putusan yang diambil baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan terkadang hanya memberikan keadilan birokratis yang menerapkan undang-undang saja, bukan keadilan substansial.⁴

³*Ibid.*, hlm 2

⁴Jurnal oleh Agus Raharjo, *Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana*, hlm 1

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.⁵

Penyelesaian sengketa melalui mediasi mendapatkan tempat dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu

⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 13

sistem hukum syariah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk social yang bermartabat.

Dalam lapangan hukum pidana, tindakan-tindakan yang termasuk delik biasa atau bukan delik aduan tidak lagi menjadi persoalan perorangan atau korban tindak pidana semata, tetapi telah menjadi persoalan masyarakat karena tindakan-tindakan itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat luas sehingga kemudian negara yang mewakili kepentingan masyarakat melalui institusi-institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan menentukan proses dan bentuk penyelesaian persoalan yang timbul dari peristiwa atau tindakan itu. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum adat dan hukum Islam yang juga menjadi sumber-sumber sistem hukum nasional Indonesia, tidak ada larangan untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah yang termasuk dalam lapangan hukum pidana secara musyawarah mufakat atau perdamaian antara korban atau

keluarga korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Dalam hukum Islam, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka si pembunuh dapat saja dibebaskan dari ancaman hukum atau proses pemidanaan tidak berlanjut. Dalam kehidupan masyarakat kita dapat menemukan juga kasus-kasus yang termasuk delik biasa atau bukan delik aduan yang diselesaikan melalui musyawarah mufakat, seperti kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan cacat atau kematian korban dan tuntutan pidananya tidak berlanjut ke pengadilan.⁶

Peristiwa yang terjadi di Desa Menganti pada tanggal 11 oktober 2012 sempat menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Pada waktu malam hari terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pria bernama Abdul Salam yang tengah berjalan bersama wanita yang merupakan kekasihnya. Kejadian tersebut bermula dari tindakan korban yang membawa wanita yang merupakan adik dari tersangka yang bersama-sama ikut menganiaya korban. Kakak

⁶Refli Umar, 2008, *Diskresi Polisi terhadap Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh Polisi Kota Besar Padang)*, Tesis Magister Hukum, Pacasarjana Universitas Andalas, Padang.

dan keluarga wanita yang diketahui bernama intan tersebut merasa direndahkan oleh perbuatan korban. Perkenalan korban dengan wanita tersebut berawal dari pertemanan media sosial *Facebook*. Komunikasi yang dijalani keduanya semakin hari semakin intens dan keduanya memutuskan untuk saling bertemu dan keduanya pun merasa cocok sampai akhirnya pertemuan tersebut terjadi beberapa kali.

Perbuatan yang dilakukan pihak keluarga intan terhadap Abdul Salam merupakan kategori tindak pidana penganiayaan berat. Akibat kekerasan yang dilakukan bersama-sama tersebut mengakibatkan Abdul Salam mengalami kerusakan pada giginya, seluruh tubuh korban menjadi luka lebam. Setelah kejadian penganiayaan tersebut Abdul Salam kemudian dibawa ke rumah sakit R.A Kartini pihak keluarga dan dokter menyarankan agar Abdul Salam tidak melakukan aktifitas selama kondisi Abdul Salam benar-bener sembuh.

Penganiayaan tersebut begitu membuat keluarga Abdul Salam terzalimi dan berakibat pula bagi keberlangsungan hidup keluarga. Abadul Salam yang merupakan tulang punggung

keluarga tidak dapat memberikan nafkah bagi keluarga untuk waktu yang cukup lama. Mediasi yang dilakukan warga terhadap keluarga korban dan tersangka sedikit mengobati rasa sakit hati yang di alami oleh keluarga dan korban. Mediasi yang dihasilkan dengan menyatakan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan kakak intan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Tersangka bersedia untuk membayar ganti kerugian yang dimaksud untuk mengganti pengobatan korban selama dalam masa pemulihan. Melihat fenomena tersebut lalu dimana posisi hukum pidana? Bagaimana membedakan delik biasa dengan delik aduan?

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di

dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁷

Islam adalah agama suci (*hanif*) yang dibawa oleh nabi Muhammad saw sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati indahny sebuah kehidupan. Oleh karena itu Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa , akal, keturunan dan harta.

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara serta melindungi eksistensi kehidupan manusia yang damai dan sejahtera. Oleh karenanya Islam sangat menghargai jiwa terlebih-lebih terhadap jiwa manusia, sebagai agama yang universal Islam juga mengatur

⁷Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. Ke-16, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm. 6.

kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan menjaga manusia dari hal-hal yang *mafsadah* maka diadakanlah pembalasan atas kejahatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan seseorang agar merasa jera dan berfikir untuk mengulangi perbuatan yang sama. Sebagaimana maksud diadakannya hukum dalam Islam, contoh tindak pidana atas jiwa yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain,⁸ dalam istilah pidana Indonesia disebut sebagai perbuatan penganiayaan, salah satu hukumnya dalam hukum pidana Islam adalah berupa hukuman *qishas*. Sanksi yang telah ditetapkan Allah tersebut antara lain untuk melindungi jiwa atau pertumpahan darah manusia beserta haknya.

Fakta bahwa dalam penyelesaian-penyelesaian hukum dalam kehidupan empirik masyarakat kita tidak selalu

⁸Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 91

dipengaruhi oleh garis batas yang kaku antara konsep hukum privat dan konsep hukum pidana sebagaimana halnya sistem hukum Barat juga tercermin dari pengamat Barat Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut.⁹

Perdamaian dalam sistem adat-istiadat maupun hukum adat kita tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak jarang perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal terjadi kematian akibat perkelahian atau pertengkaran, perdamaian, terjadi melalui kompensasi terhadap keluarga korban. Kompensasi tidak semata bersifat materiil.

Dapat juga bersifat immaterial seperti denda adat, kewajiban melakukan sesuatu untuk memulihkan keseimbangan magis. Bahkan, pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang tulus dan diterima oleh pihak keluarga korban tidak jarang menjadi dasar perdamaian yang penting. Lebih dari itu, upaya damai semacam ini harus membawa konsekuensi hukum, yaitu menutup perkara begitu dicapai perdamaian. Doktrin yang mengatakan, sifat pidana tidak hapus sehingga perkara akan tetap diteruskan walaupun ada perdamaian, mestinya dihapuskan.

Makna damai juga ditemukan dari kata Islam dan ditemukan dari misi totalitas ajaran Islam, yaitu menebarkan

⁹Bagir Manan, 2006, “*Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*”, dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006, hlm. 10-11.

rahmat dan mewujudkan damai bagi seluruh alam. Dalam al-Quran surat al-Anbiya' ayat 107 Allah menegaskan yang bunyinya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam".*
(QS.al-Anbiya' : 107)

Ayat ini mengungkapkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad melalui risalah Islam bertujuan mewujudkan damai, menyelesaikan konflik/sengketa dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang senantiasa membangun dan menciptakan damai (*peace-maker*). Oleh karena itu, dalam menyebarkan ajaran Islam yang damai, al-Quran menggunakan pendekatan *hikmah* (bijaksana), *mau'izab hasanah* (persuasif), dan argumentasi yang santun (an-Nahl: 125), ketiga pendekatan ini sesuai dengan esensi ajaran agama yang menekankan penyerahan diri secara tulus, dan tanpa paksaan. Muslim adalah orang yang tulus dalam penyerahan diri kepada Allah, dan senantiasa mewujudkan damai dalam kehidupan.

Dari pemaparan diatas bahwa tindak pidana penganiayaan adalah salah satu kejahatan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang tepat untuk menyelesaikan agar korban mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Karena pada hakikatnya korbanlah yang secara langsung mengalami kerugian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Lebih jauh lagi penulis memberikan pandangan lain yakni dari hukum Islam. Maka, skripsi ini penulis beri judul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Di Desa Menganti Kabupaten Jepara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Mediasi di Desa Menganti dalam Perspektif KUHP di Indonesia?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam skripsi ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di Desa Menganti
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun manfaat skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan akademik, maka skripsi ini dapat merupakan sumbangan pemikiran tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana secara mediasi dan juga untuk menambah literatur atau bahan referensi pada Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, serta sumbangsih bagi dunia pendidikan.
2. Bagi kepentingan pengambil kebijakan, maka skripsi ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dan

khususnya bagi penegak hukum. Bagi pembentuk undang-undang skripsi ini sebagai masukan dalam memahami substansi serta tetap memperhatikan prinsip mediasi.

3. Bagi masyarakat umum, maka skripsi ini dapat sebagai informasi tentang proses mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat urusan sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis dan buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Sandi Putra¹⁰ yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly)”*. Sandi Putra berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam

¹⁰Skripsi Karya Sandi Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly)*. (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015)

menjatuhkan putusan pada perkara ini, terdapat beberapa kekurangan-kekurangan seperti yang Penulis uraikan di atas, terutama pada pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Pertimbangan yang digunakan Hakim pada perkara ini, cenderung terfokus kepada keadaan pelaku tindak pidananya saja. Padahal Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian akan menciptakan putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menjaga eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang betul-betul mampu mengakomodir akan kebutuhan keadilan masyarakat.

Kedua, Skripsi karya Siti Badriyah yang berjudul *“Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan*

Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)”. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa hukuman yang ditetapkan oleh hakim menurut hukum pidana Islam dalam kategori jarimah *hudud*, yaitu jarimah atau kejahatan yang hukumannya telah ditentukan macam dan bentuk hukumannya menjadi hak Allah. Dalam hukum positif putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada pelaku penganiayaan adalah tidak memberikan keadilan yang berarti tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Ketiga, Skripsi karya Ni Komang Surianti Ningsih yang berjudul “*Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana*”. Hasil penelitian ini yakni bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan retributive belum memberikan bentuk keadilan kepada semua pihak khususnya kepada korban. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pembaharuan hukum, yakni dengan menerapkan mediasi penal. Mediasi penal merupakan bentuk penjabaran nilai keadilan

¹¹Skripsi karya Siti Badriyah, *Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2007)

restorative, dimana para pihak yakni pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat bersama-sama mencari jawaban terhadap persoalan yang ada. Penerapan mediasi penal ini sudah dilaksanakan dan diatur dalam beberapa sistem hukum negara asing seperti Jerman, Polandia, Belgia dan lainnya. Keadilan restoratif merupakan paradigma pemidanaan baru yang berorientasikan pada kepentingan semua pihak (baik pelaku, korban dan masyarakat). Salah satu bentuk keadilan restorative adalah mediasi penal. Pelaksanaan mediasi penal ini memiliki ciri khas yang hampir sama dengan mediasi dalam hukum perdata. Dimana perkara pidana yang terjadi tidak dianggap sebagai tindak pidana pada umumnya akan tetapi dianggap sebagai konflik antara pelaku dan korban. Dalam mediasi pelaku dan korban diajak berdialog guna mencari penyelesaiannya.¹²

Dari beberapa penelitian diatas penulis belum menemukan pembahasan mengenai mediasi penal dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian terdahulu hanya sebatas

¹²Skripsi karya Ni Komang Surianti Ningsih *,Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2015)

membahas mengenai mediasi penal sebagai penyelesaian tindak pidana secara umum. Namun dalam pembahasan kali ini penulis akan menggambarkan mengenai proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan berdasarkan pada data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai pelengkap. Kemudian pendekatan terhadap

permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan dan menemukan data serta informasi melalui studi kepustakaan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara pengaturan dalam norma-norma hukum terkait masalah penelitian dengan pelaksanaan sosiologis riil di lapangan¹³.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah penelitian langsung kepada para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Desa Menganti.

¹³ Lexy J. Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2009, h.6

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang ¹⁴berhubungan dengan objek penelitian, buku-buku, jurnal penelitian, dan peraturan perundang-undangan atau data yang berasal dari orang kedua artinya data merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya seseorang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui wawancara maupun pengamatan (*observasi*). Adapun penelitian kepustakaan didapatkan melalui dokumen, pengumpulan dan telaah bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah, hasil penelitian, bahan makalah/seminar, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan guna memperoleh,

¹⁴Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30

mengumpulkan data dan menilai validitasnya untuk¹⁵ membantu penulis mengembangkan objek yang diteliti.

a. Observasi Langsung

Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang diteliti.¹⁶ Penulis akan melakukan observasi langsung dikalangan tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, mediator, korban serta pelaku penganiayaan. Observasi dimaksudkan untuk mendapat informasi awal kondisi langsung di lapangan, sehingga dimungkinkan adanya kontak dan kerjasama dalam forum lebih lanjut.

b. Wawancara

Alat ini digunakan untuk mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan, diantaranya aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, mediator, korban serta pelaku agar diperoleh informasi mendalam mengenai kejadian yang

¹⁵Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 65-66.

sebenarnya. Wawancara ini dilakukan secara terarah dan intensif.¹⁷

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan khusus. Penulis juga akan memasukkan unsur penelaahan kritis terhadap data-data yang ada serta memberikan penilaian yang jujur atasnya menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, tanpa berusaha mereduksi fakta lapangan dengan subjektivitas penulis

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri atas 6 sub bab, yakni meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Mediasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab ini terdiri atas sub bab. Sub bab pertama tentang pengertian mediasi. Sub bab kedua tentang prinsip mediasi. Sub bab ke tiga tentang mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Bab III: Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Menganti. Bab ini terdiri atas 3 sub bab. Sub bab pertama tentang profil Desa Menganti. Sub bab kedua tentang kronologi kasus penganiayaan di Desa Menganti. Sub bab ketiga tentang pelaksanaan mediasi di Desa Menganti.

Bab IV: Analisis tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan mediasi. Bab ini terdiri atas 2 sub bab. Sub bab pertama analisis tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan mediasi. Sub bab kedua tentang relevansi tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penganiayaan melalui upaya mediasi

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN DAN MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak atau netral dan tidak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan atau hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, bahkan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah.¹

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 26

menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa².

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan

²Syahrizal Abas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: kencana, 2011), hlm 14

tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak³.

Wacana tentang pembaharuan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) terus berkembang dari masa ke masa. Berbagai gagasan bermunculan seiring dengan banyaknya perspektif yang digunakan dalam rangka mendukung argumentasi yang dikemukakan, tentu saja keragaman itu dipengaruhi pula oleh latar belakang dari masing-masing pengusung gagasan tersebut. Namun demikian dalam perkembangannya dewasa ini, dorongan berbagai gagasan dan wacana yang muncul itu masih terbukti masih banyak memberikan perubahan yang fundamental atas karakteristik tradisional yang telah melekat pada sifat utama sistem peradilan di dunia.

Sulitnya merubah karakteristik tradisional dalam sistem peradilan pidana baik di negara penganut sistem hukum *common law* maupun *civil law*, pada dasarnya disebabkan oleh sifat hukum pidana itu sendiri yang terlanjur telah disampaikan dan dibukukan sebagai bagian dari hukum publik (*algamene belangen*). Bagaimanapun juga

³ *Ibid.*, hlm. 16

fleksibelnya kaidah-kaidah pidana disusun dan diberlakukan, pada akhirnya tetap saja akan menghasilkan polarisasi kaku, yakni sedikitnya peran individu, dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara bagian yang terutama bagi penentu dan pemberian rasa keadilan.

Polarisasi yang demikian itu dapat dipahami sebagai konsep hukum dalam hubungannya dengan keadilan yang sempurna. Konsep ini dikemukakan oleh Plato, yang pada intinya menekan hukum sebagai tatanan dimana hanya kepentingan umum yang diutamakan. Kepentingan umum yang dimaksud adalah partisipasi semua orang dalam gagasan untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya oleh negara, sehingga keadilan tercapai secara sempurna⁴.

Dengan demikian maka negara yang menetapkan norma-norma keadilan, negara yang membentuk sekaligus pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, pada gilirannya negara pula yang memutuskan atau memberikan keadilan. Demikian halnya dalam hukum pidana, perbuatan pidana dipandang sebagai suatu tindakan

⁴Karya tulis Teddy Lasmana yang berjudul “*Mediasi Penal dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, 2012, hlm. 1-2.

yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain, Inilah dasar bagi korban sebagai pihak yang dirugikan untuk melakukan suatu pembalasan kepada pihak yang merugikannya. Dalam perspektif kehidupan bersama pada suatu masyarakat, pembalasan tersebut umumnya tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana itu semata, tetapi berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, bahkan dalam beberapa hal dipandang sebagai kewajiban dari masyarakat. Sehingga akhirnya pembalasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Konsep ini telah dan sedang berlaku di Indonesia paling tidak sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahkan dalam konteks hukum kolonial, Konsep dan mekanisme ini telah berlaku sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, yang kemudian setelah kemerdekaan ketika masih menggunakan *Het Herzijne Inlandsch Reglemen* (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) peninggalan Belanda sebagai Hukum Acara Pidana⁵.

⁵ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie -Publishing, Depok, hlm. 45

Memperhatikan secara seksama sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mengurangi jika enggan untuk menyebut menghilangkan peranan penting individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pencarian keadilan dalam perkara pidana sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang semula diharapkan dapat memperbesar peran individu melalui pendampingan korban dan upaya-upaya di luar pengadilan, ternyata tidak merubah sifat ‘kaku’ pada sistem peradilan pidana Indonesia. Advokat baru akan berdaya guna dan dinilai perbuatannya dalam rangka mencari keadilan, hanya atas tindakannya di muka persidangan dalam pengadilan. Sementara hasil upaya yang dilakukan diluar pengadilan, seperti hasil perundingan dan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum untuk dinilai sebagai bahan pertimbangan suatu putusan sidang pengadilan⁶.

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum di Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.⁷ Oleh karena itu, diperkenalkanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana penegakan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Mediasi untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No. Pol B/3022/XII/2009/ SDOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* meskipun sifatnya parsial, menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan *ADR*, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum

⁷ Rudi Rizky (ed) *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4

yang berlaku secara profesional dan proporsional. Inilah paling tidak pengertian mediasi yang dikenal saat ini di Indonesia⁸.

Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Dengan adanya ADR para pihak yang bersengketa dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa tidak harus atau tidak selalu ke pengadilan, ada alternatif lain yang juga layak untuk ditempuh yang dalam beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan. Bahkan dalam proses persidangan perdata di Indonesia saat ini, *daading*

⁸ Rudi Rizky (ed) *,Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4

(perdamaian dihadapan hakim) harus ditempuh melalui mekanisme Mediasi (*court-annexed mediation*)⁹.

Dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan *Ash-Shulh* yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan, *ash-shulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Dalam terminologi ilmu fiqih *ash-shulhu* memiliki pengertian perjanjian untuk menghilangkan polemik antar sesama lawan sebagai sarana mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih. Di dalam *Ash-shulhu* ini ada beberapa istilah yaitu: Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan di sebut *musalih' anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14

mengakhiri pertikaian/ pertengkaran dinamakan dengan *musalih' alaihi*¹⁰.

Menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi antara ummat manusia, Islam telah memberikan beberapa konsep dasar untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian masalah ini dapat melalui *shulhu* (perdamaian)¹¹.

Imam Ash-Shan'ani menerangkan hadits di atas dengan berkata :

قَسَمَ الْعُلَمَاءُ الصُّلْحَ أَقْسَامًا، صُلْحَ الْمُسْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ، وَالصُّلْحَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
وَالصُّلْحَ بَيْنَ الْفَتَى الْبَاغِيَةِ وَالْعَادِلَةِ وَالصُّلْحَ بَيْنَ الْمُتَعَاذِيَيْنِ وَالصُّلْحَ فِي الْجِرَاحِ
كَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ إِذْ وَقَعَتْ فِي الْأَمْلاكِ وَالْحُقُوقِ وَهَذَا
الْقِسْمُ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الصُّلْحِ

Artinya: “Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada

¹⁰ Salim Seggaf Al Jufri dalam Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jamaatul Muslimin*, Jakarta: Rabbani Press, 1993, hlm xvii

¹¹ Hamka, Ibid. Persaudaraan ini diterjemahkan Hamka, sebagai ikatan iman kepada Allah meskipun tidak satu keluarga. Sehingga persaudaraan ini digunakan sebagai pemahaman akan penyelesaian konflik antar sesama muslim

harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada bab ash-shulhu (perdamaian).” (Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, 4/247).

Secara ringkas hikmah *ash-shulhu* dapat mengakibatkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak dan tetap berada di jalan Allah serta syariat Islam. Serta melindungi seorang muslim dari penyakit hati terutama iri dan dengki juga menghindari seseorang dari sikap curiga terhadap lawannya dalam suatu sengketa atau masalah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Dalam kamus hukum tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.¹² Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dan secara umum oleh

¹²Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 144.

pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*. Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.¹³

Dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi:

1. suatu perbuatan
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan¹⁴

Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

¹³Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum* (Jakarta: Grafika, 1991), hlm. 4

¹⁴*Ibid.*

sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang mendefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Berdasarkan pendapat Moeljatno di atas bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur :

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
- b. Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Usman Simanjuntak, dalam bukunya “*Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum*” mengatakan bahwa:

“Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan phisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana”.¹⁵

Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” dalam mengartikan “*Straff baar Feit*”,

¹⁵Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, (Bina Cipta, Jakarta, 1994), hlm 95

karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan *phisik* perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan *phisik* itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan phisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta*

commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalificeerde*

delicten) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).¹⁶

Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *Jarimah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang di kalangan fuqoha. Pengertian *Jarimah* secara terminologi mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had, *qisas*, atau

¹⁶*Ibid.*

ta'zir.¹⁷ Meskipun demikian yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan pembunuhan dan sebagainya.¹⁸ Para fuqaha' sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah*. Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa fuqaha' yang membatasi kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *jarimah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.¹⁹

Menurut Ahli Fiqih yang dimaksud dengan pidana penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa. Baik itu menganiaya atau menyakiti termasuk juga melukai, memukul, menarik, memotong rambut dan mencabutnya. Para Ahli Hukum Pidana Mesir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah melukai dan memukul saja. Pendapat ini menganggap bahwa memukul dan melukai

¹⁷A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

¹⁸A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hlm.1

¹⁹Opcit., hlm. 9-10.

termasuk menyakiti dan mencakup semua perbuatan yang ditimpahkan pada badan yang berdampak pada jasmani dan rohani. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) diistilahkan dengan (على مادون جنابة النفس) yang digunakan secara jelas oleh hanafiyah. Istilah ini lebih luas dari Undang-Undang hukum pidana Mesir yang menyebut dengan istilah (الضرِب) pelukaan (الجرَح) dan pemukulan. Inti dari unsur penganiayaan adalah perbuatan menyakiti seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Tindak Pidana penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.

penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai: “perlakuan yang sewenang-wenang...”²⁰

Pengertian yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut :

*Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan ...*²¹

Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.²²

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

²¹Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 174.

²²Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 83.

Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah:

*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.*²³

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”.

²³*Ibid.*

- 1) “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) “rasa sakit” misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

B. Prinsip Mediasi

Mediasi hanya bisa berjalan dengan baik jika para pihak secara sukarela memilih penyelesaian melalui mediasi dan memilih siapa yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa mereka. Begitu pula bagi mediator harus menerima tanggung jawab tersebut secara sukarela tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari manapun.

Pada pemeriksaan ditingkat penuntutan dan disidang pengadilan, Andi Hamzah (pakar Hukum Pidana) menjelaskan

bahwa mediasi dapat saja dilakukan dengan pertimbangan kapasitas hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum..²⁴

Mudzakir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan Yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

²⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat Penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (diponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Mediasi yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :²⁵

1. **Penanganan konflik** (*Conflict Handling/ Konflikt bearbeitung*):

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. **Berorientasi pada proses** (*Process Orientation; Prozessorientierung*):

Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

3. **Proses informal** (*Informal Proceeding – Informalität*):

²⁵Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation – a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html.di akses tanggal 24 febuaru 2017

Mediasi merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

4. **Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak** (*Active and Autonomous Partici-pation – Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Ide mediasi mempersatukan mereka yang menghendaki dilakukannya rekonstruksi model terdahulu, mereka yang menghendaki diperkuatnya kedudukan korban, mereka yang menghendaki alternatif pidana, dan mereka yang menghendaki dikurangnya pembiayaan dan beban kerja dari sistem peradilan pidana atau membuat sistem ini lebih efektif dan efisien.

Di samping latar belakang perkembangan teoritik dan internasional di atas, kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan

religius sudah lama mengenal lembaga mediasi ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.²⁶ Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.²⁷

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia pun pernah terjadi (dalam kasus Ny. Ellya Dado, disingkat “Kasus Ny. Elda”), adanya “perdamaian” digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Mediasi dimaksudkan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, oleh karenanya mediasi ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Tater Opfer Ausgleich* (TOA) atau *Offender Victim Arrangement*

²⁶Lihat Hilman Hadikusuma. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

²⁷ Yang intinya adalah: Pasal 13: sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat. Pasal 14 perdamaian : mengikat para pihak; yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat. Pasal 15: Ayat (1) apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum. (2) Keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

(OVA).²⁸ Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui baik dalam bentuk penyelenggaraan keadilan restoratif seperti:

- a. *Victim Offender Mediation (VOM)*: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing*, yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi korban juga tidak langsung

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, loc. cit., hlm. 16.

(*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku.

- c. *Circles*, suatu model penerapan keadilan restoratif yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Barda Nawawi melihat Konsep Mediasi dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.²⁹ Tentunya yang lebih penting adalah prinsip Integrasi yang mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam perkara untuk bersama sama menyelesaikan perkara ini.³⁰ Penyelesaian perkara pidana ini penting sebagai kelebihan penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana.

²⁹ Barda Nawawie Arif, Op Cit, hlm 23

³⁰ Ainal Mardiah, dkk dalam *Mediasi Penal sebagai Alternative Model Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana. Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus hlm. 4.2012., Hlm 6

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :³¹

a. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 yakni untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Dilihat dari sudut cara pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk Undang-Undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan pasal 351 ayat (1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut

³¹Leden Marpaung, *Opcit*, hlm.52

kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- 1) *Penganiayaan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.*
- 2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- 5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*³²

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-

³²R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995), hlm. 245-246

Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) *Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau larangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500*
- 2) *Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.*³³

Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP (Hindia Belanda) adalah sebagai perkecualian dari *asas concordantie*.

³³R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, cet. 16, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 216

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- (1) *Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;*
- (2) *Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;*
- (3) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.*³⁴

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan

³⁴*Ibid*, hlm. 217

berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opsettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (pasal 340).

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;*
- 2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.*³⁵

³⁵KUHP dan KUHPA beserta penjelasannya; Citra Umbara, 2006, hlm. 109

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan dibagian depan, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*Opzettelijk*);
- b. Perbuatan : melukai berat;
- c. Objeknya: tubuh orang lain;
- d. Akibat : luka berat.

Perbuatan melukai berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga, menjadikan luka berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*Opzettelijk*) disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam tiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan.

Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, yakni :

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).
- c. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*³⁶

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus

³⁶*Ibid*, hlm. 110

terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) *Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 352, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :*
- 2) *Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;*
- 3) *Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;*
- 4) *Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kejahatan untuk dimakan atau diminum.*³⁷

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (pasal 351), penganiayaan berencana

³⁷*bid*, hlm. 110

(pasal 353), penganiayaan berat (pasal 354) dan penganiayaan berat berencana (pasal 355) terletak pada 2 hal, ialah :

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai :
 - 1) Ibunya;
 - 2) Bapaknya yang sah;
 - 3) Istrinya;
 - 4) Anaknya;
 - 5) Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Para ulama membagi masalah *Jinayah* menjadi tiga bagian. Pembagian ini didasarkan terhadap bobot hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *Jarimah*, sedangkan hukuman itu sendiri didasarkan atas ada tidaknya dalam nash al-Qur'an dan *as – sunnah*.³⁸

³⁸ Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 2

a. *Jarimah Hudud*

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*)³⁹.

Hukuman *Jarimah* ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap *Jarimah*. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *Jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *Jarimah* ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain.

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat *Jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan syara. Jadi, fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan tidak berijtihad dalam memilih hukuman. Adapun *Jarimah* yang termasuk dalam kelompok *hudud* menurut, para Ulama, ada tujuh

³⁹Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, hlm. 1

macam *Jarimah*, yaitu perzinahan, *qadzaf* atau (menuduh orang berzina), *asyrib* atau minum-minuman keras, sariqah atau pencurian, *hirabah* atau pembegalan, *al-baghyu* atau pemberontakan, dan *riddah* atau keluar dari agama Islam.⁴⁰

b. *Jarimah qisas / diyat*

Seperti halnya *Jarimah* hudud, *Jarimah qisas / diyat* pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jadi, *Jarimah* ini pun terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk *Jarimah* ini hanya satu untuk setiap *Jarimah*. Satu-satunya perbedaan *Jarimah qisas/diyat* dengan *Jarimah* hudud adalah *Jarimah qisas/diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami membuka kesempatan pemanfaatan bagi si pembuat *Jarimah* oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus *Jarimah qisas/diyat* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *Jarimah*, menjadi *qisas* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali.

⁴⁰Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam, hlm. 2

Untuk menjamin ketertiban dan keamanan yang berkenaan dengan nyawa dan anggota badan lainnya. *qisas* dipandang lebih menjamin dari pada jenis hukum lainnya Seseorang akan berpikir dua kali untuk membunuh misalnya kalau akibat yang bakal dia terima persis seperti apa yang dia lakukan terhadap orang lain.

Perbedaan *qisas* dengan *diyat* adalah *qisas* merupakan bentuk hukuman bagi pelaku *Jarimah* terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun *diyat* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *Jarimah* dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.

Jarimah yang termasuk dalam kelompok *Jarimah qisas /diyat* terdiri atas lima macam. Dua *Jarimah* masuk dalam kelompok *Jarimah Qisas* yaitu pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga *Jarimah* termasuk dalam kelompok *diyat* yaitu pembunuhan tidak disengaja pembunuhan semi sengaja dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di

samping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qisas* yang dimaafkan.⁴¹

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *Jarimah* yang diancam dengan hukum *Ta'zir* yaitu hukuman selain had dan *qisas* /*diyat*. Pelaksanaan hukuman *Ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam *Jarimah Ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian yang mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *Jarimah*.⁴²

C. Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk

⁴¹ Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 27

⁴² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 1

penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Indonesia pada sila ke-4, dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah dan mufakat yang berujung damai juga digunakan dalam lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial belanda. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.⁴³

Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Mereka lebih mempertimbangkan penyelesaian masalah untuk masa depan dengan mengkomodasikan

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 640

kepentingan mereka secara berimbang dan bentuk penyelesaian sengketa ini sering disebut dengan musyawarah atau mufakat.

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *islah (as-sulh)* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.⁴⁴

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”⁴⁵

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah:

⁴⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah, Juz III* (Beirut: Dara al Fikr, 1977), 305

⁴⁵ Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَرْحَمُونَ

Artinya: *sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertawakalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Q.S.Al Hujarat : 10)*

Nabi SAW dalam prakteknya juga memberlakukan *shulh* terhadap manusia. Umar *radhiyallahu ‘anh* berkata: “Kembalikanlah orang-orang yang bertengkar agar kembali damai, jika keputusan diselesaikan malah akan mengakibatkan dendam”. Kaum muslimin juga sepakat bahwa *shulh* disyari’atkan antara kedua pihak yang bertengkar. Ketahuilah, bahwa derajat orang yang mendamaikan dua orang yang bertengkar melebihi derajat orang yang berpuasa sunat dan qiyamul lail. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ». قَالُوا بَلَى. قَالَ »
إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقِ

“Maukah kalian aku beritahukan amalan yang lebih utama dari derajat puasa (sunat), shalat (sunat) dan bersedekah?” Para sahabat menjawab, “Ya.” Beliau menjawab, “Yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar, dan rusaknya hubungan dapat memangkas agama.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

dari Abud Darda', dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 2595).

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan *culture* (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. Dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata "kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah

dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”⁴⁶.

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini MA) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*⁴⁷

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, mimeo, (tt: tp, 2004), 1

⁴⁷ Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini (mediasi dan litigasi) diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai maka pihak yang lainnya akan

mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum. Lihat *tinjauan proses penyelesaian sengketa Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000) hal. 23-33

BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DESA MENGANTI

A. Profil Desa Menganti

Desa Menganti sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Kedung terletak di sebelah Kota Jepara yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kerso

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Dongos

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Bugel

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Bulak Baru

Jarak Desa Menganti ke Ibu Kota Kecamatan Kedung yaitu ± 1 km dapat ditempuh dengan waktu ± 10 menit apabila menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jepara sejauh ± 10 km dengan jarak tempuh ± 30 menit apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor.

Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Desa Menganti terletak mulai dari 10 m sampai dengan 15 m.

Secara administratif wilayah Desa Menganti terdiri dari 23 RT dan 5 RW, yang masuk ke dalam 4 wilayah pedukuhan, yaitu Dukuh: Kretek, Sumur Gede, Ploso dan Joho .

Kemudian secara topografi Desa Menganti dapat dibagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah dataran rendah di bagian Selatan dan wilayah dataran tinggi di bagian Utara Menurut klasifikasinya Desa Menganti termasuk kategori Desa Industri dan pertanian.

Berdasarkan data administrasi desa, Penduduk Desa Menganti pada tahun 2015, berjumlah 6922 jiwa terdiri dari : penduduk berjenis kelamin laki-laki 3467 jiwa dan perempuan 3455 jiwa. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Menganti sebagian besar adalah Petani, kemudian Wiraswasta dan Buruh serta sebagian kecil PNS

Desa Menganti Kecamatan Kedung memiliki prioritas pembangunan pada beberapa aspek, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
3. Peningkatan pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada ekonomi lokal yang mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar.
4. Optimalisasi upaya penggalan (intensifikasi dan ekstensifikasi) sumber-sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan desa.
5. Peningkatan pengembangan SDM masyarakat & aparat Pemerintahan Desa dalam rangka mendukung penciptaan tata pemerintahan yang baik (good governance).
6. Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup.
8. Peningkatan kualitas masyarakat yang semakin baik terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan situasi dan kondisi demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka meningkatkan dan / atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Diharapkan visi Desa Menganti dapat digunakan sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) Desa Menganti untuk terus bekerja keras membangun desa dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

a. Visi

Berbekal pada potensi dan kondisi strategis yang dimiliki, maka Desa Menganti menetapkan visi lima tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Menganti sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERPADU
DENGAN BERWAWASAN PEMBANGUNAN YANG
KOMPREHENSIF DAN BERDAYA GUNA”**

Secara komprehensif perwujudan visi tersebut menggambarkan harapan yang dicita-citakan kedepan oleh segenap komponen masyarakat Desa Menganti yaitu menjadikan Desa Menganti memiliki masyarakat yang terpadu dengan berwawasan pembangunan yang komprehensif dan berdaya guna.

b. Misi

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya di arahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan Desa Menganti untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut¹:

¹ www.kab.jepara.ac.id

- 1) Meningkatkan kualitas kebersamaan dalam pola kehidupan bermasyarakat, baik sebagai aspek individual maupun sosial.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia dalam prinsip-prinsip kemanusiaan yang bermartabat dan budaya luhur.
- 3) Meningkatkan terjalinyya transformasi informasi baik vertical maupun horizontal demi terwujudnya suatu system yang sehat.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan pribadi dan golongan.
- 5) Meningkatkan pola pikir dalam kehidupan dengan berprinsip pada falsafah :
 - a) *Ing ngarso sungtolodho.*
 - b) *Ing madyo mangun karso.*
 - c) *Tut wuri handayani.*

- 6) Meningkatkan pelaksanaan kinerja yang sinergis sebagai perwujudan suatu amanat bersama yang jelas-jelas nyata dan tidak hanya sekedar retorika.

B. Kronologi Kasus Penganiayaan di Desa Menganti

Kasus penganiayaan yang terjadi di desa Menganti ini terjadi antara korban yang bernama Abdul Salam seorang pemuda yang berasal dari Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dengan seorang pemuda bernama Ali Wibowo yang juga warga Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 23 oktober. Peristiwa itu terjadi ketika Abdul Salam mengajak kencan seorang gadis yang bernama Intan. Intan ini juga merupakan warga Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Intan merupakan kekasih dari Abdul Salam.

Awal mula terjadinya penganiayaan ini ketika Abdul Salam dan Intan pergi dari rumah untuk pergi bersama di waktu malam hari. Intan yang pergi dari rumah tanpa sepengetahuan

pihak keluarga yaitu dengan cara melewati pintu jendela kamar Intan yang membuat kedua orang tuanya kebingungan. Dan akhirnya ayah intan menyuruh semua keluarga untuk mencari intan. Mengetahui bahwa intan tidak ada di rumah Ali Wibowo yang merupakan kakak dari intan langsung emosi dan marah. Ali Wibowo mengajak teman-temannya untuk ikut mencari adiknya yang pergi dari rumah.

Sekitar pukul 12 malam, Abdul Salam dan Intan hendak pulang ke rumah dengan melewati jalan yang tidak biasanya di lewatinya. Ketika melewati perempatan jalan yang tidak jauh dari rumah intan, ada segerombolan pemuda yang langsung menghadang motor Abdul Salam dan Intan. Abdul Salam yang kaget langsung menghentikan sepeda motornya. Tanpa berkata sepatah katapun Ali Wibowo langsung memukul Abdul Salam di bagian mulut yang menyebabkan dua giginya patah. Tidak hanya dipukuli dibagian wajah tetapi Abdul Salam juga

dikeroyok oleh semua pemuda yang ada dilokasi yang membuat Abdul Salam luka parah².

Abdul Salam yang terluka cukup parah tidak bisa membuat perlawanan dan akhirnya motor dan dompet Abdul Salam di ambil oleh seseorang yang tidak diketahui untuk dibawah keramah Intan. Abdul salam yang terluka parah pulang ke rumah dengan jalan kaki. Setelah sampai rumah melihat Abdul Salam yang terluka dan berdarah membuat keluarganya syok dan kaget. Keluarga Abdul Salam atas perlakuan yang diterimanya dan langsung melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Akan tetapi kepolisian tidak langsung memproses kasus tersebut melainkan menawarkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau Mediasi. Keluarga Abdul Salam yang tidak terima karena penganiayaan yang membuat luka cukup parah, akhirnya menginginkan ganti kerugian untuk pengobatan dan perawatan³.

² Hasil wawancara dengan korban, dilaksanakan pada tanggal 14 september 2016

³ Hasil wawancara dengan korban, dilaksanakan pada tanggal 15 september 2016

Perdamaian dilakukan di kediaman korban dengan mendatangkan keluarga pelaku dan beberapa saksi dari pihak Desa. Perdamaian ini ditengahi oleh bapak Bisri yang merupakan ustad setempat. Proses perdamaian ini mengedepankan kepentingan kedua belah pihak. Pihak korban pertama kalinya menginginkan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pihak pelaku merasa keberatan dan menawarkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya mediator yaitu bapak Bisri menyarankan untuk ganti kerugian ini sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Akhirnya perdamaian yang disepakati ini menimbulkan beberapa perjanjian, diantaranya pihak pelaku harus membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengobatan dan lain-lain.

C. Pelaksanaan Mediasi di Desa Menganti

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi hampir sama dengan yang di kenal diskresi (discretion) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana, seperti

kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai win-win solution yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Mediasi dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Mediasi yang dilakukan di Desa Menganti dalam penanganan kasus penganiayaan merupakan kesepakatan antara pihak korban dan tersangka dengan penengah (mediator) yakni Bapak Bisri yang merupakan tokoh agama di Desa tersebut dengan disaksikan oleh beberapa warga dan pihak Desa.

Mediasi dilakukan setelah korban mengadu ke pihak kepolisian. Namun belum sampai kasus tersebut dilanjutkan dalam penyelidikannya dari pihak kepolisian menyarankan untuk melakukan perdamaian. Hal tersebut direspon baik oleh pelaku meskipun pada saat itu korban tidak menghendaki. Pihak korban tetap menginginkan dilakukan proses hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dialaminya tersebut.

Namun akhirnya pihak korban menyetujui dilakukannya perdamaian namun dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh pelaku. Keduanya sepakat untuk menunjuk satu orang sebagai mediator. Bapak Bisri yang merupakan warga Desa Menganti yang dianggap memiliki

kepribadian yang baik dan bijak ditunjuk untuk menjadi mediator.

Pelaksanaan mediasi dilakukan di kediaman Abdul Salam. Pemilihan tempat sudah mediasi sudah dilakukan kesepakatan bersama. Alasan dipilihnya di kediaman Abdul Salam adalah karena dirinya yang merupakan pihak yang paling dirugikan atas kasus penganiayaan tersebut. Bisri diakuinya belum pernah sama sekali menengahi suatu perkara.⁴ Namun pihaknya berusaha untuk bersikap bijak dalam menyelesaikan kasus penganiayaan tersebut. Bisri mengatakan bahwa keduanya merupakan warga Desa Menganti yang baik, tidak pernah terlibat suatu tindakan kriminal di Desa tersebut. Sehingga ia sangat menyayangkan kasus penganiayaan tersebut terjadi.

Ali Wibowo yang merupakan pelaku dari penganiayaan tersebut mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal. Dia tidak

⁴Wawancara dengan Bisri yakni Mediator dalam kasus penganiayaan di Desa Menganti. Dilakukan pada tanggal 20 November 2016 pukul 19.05 WIB.

menyangka begitu kejam perbuatannya terhadap Abdul Salam.⁵ Namun perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ia menyadari harus ada penyelesaian. Ali Wibowo mengatakan telah melakukan permohonan maaf kepada pihak korban.⁶ Ali pun sempat menjelaskan bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukannya tersebut semata-mata untuk memberi perlindungan kepada Intan yang merupakan adik. Karena pihak keluarga Intan berpikiran bahwa Abdul Salam telah melakukan perbuatan yang tidak ber-etika dengan membawa Intan tanpa sepengetahuan keluarga hingga larut malam.

Mediasi dilakukan di kediaman Abdul Salam sekitar pukul 20.00 WIB. Mediasi tersebut disaksikan oleh warga sekitar yang penasaran. Dalam mediasi tersebut menimbulkan beberapa perselisihan untuk pembayaran ganti kerugian karena dianggap terlalu memberatkan pihak pelaku. Pihak korban yang meminta ganti kerugian yang dianggap terlalu besar untuk

⁵Diketahui bahwa Ali Wibowo dan Abdul Salam merupakan teman bermain. Keduanya telah saling mengenal sejak lama

⁶Wawancara dengan Ali Wibowo yang merupakan pelaku dari kasus penganiayaan tersebut. Pada tanggal 20 september 2016 pukul 21.10 WIB.

pihak pelaku. Disinilah peran mediator yang akhirnya dipilih jalan tengah dan bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah diajukan beberapa persyaratan yang diinginkan pihak korban kepada Ali Wibowo dan keluarga pelaku, akhirnya keduanya sepakat. Dengan beberapa pertimbangan dan Bisri sebagai mediator merasa kesepakatan yang dilakukan keduanya baik dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku maka telah terjadi beberapa poin yang harus dilaksanakan oleh keduanya, diantaranya:

1. Ali Wibowo telah memohon maaf baik secara tertulis maupun lisan kepada Abdul Salam dan keluarga atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Abdul Salam dan keluarga telah memberikan maaf kepada Ali Wobowo dengan berjanji bahwa Ali Wibowo tidak melakukan perbuatan serupa kepada dirinya maupun orang lain.
3. Ali Wibowo telah bersedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan Abdul Salam yang berkaitan dengan perbuatan penganiayaan tersebut.

4. Ali Wibowo bersedia membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pelaku telah berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dapat merugikan keselamatan orang lain.
6. Pihak korban dan pelaku berjanji akan melaksanakan semua kesepakatan yang telah disepakati bersama.
7. Kesepakatan ini berlaku bagi kedua belah pihak yang berperkara. Apabila kesepakatan ini ternyata dilanggar oleh salah satu pihak maka akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DESA MENGANTI

A. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di Desa Menganti

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini tindak pidana penganiayaan diartikan sebagai perbuatan pelukaan terhadap anggota badan. Sementara itu dalam KUHP merumuskan delik penganiayaan sebagai perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja melukai orang lain dengan unsur-unsur; (1) Penganiayaan merupakan perbuatan yang mengakibatkan luka atau cederanya anggota tubuh seseorang; (2) penganiayaan itu sengaja, artinya diniatkan untuk melukai atau mencederai. KUHP juga menempatkan penganiayaan sebagai tindak pidana materiel (*material delict*), artinya kesempurnaan tindak pidana itu tidak cukup dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para dengan dibantu oleh mediator. Mediasi untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No. Pol B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* meskipun sifatnya parsial, menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan *ADR*, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Inilah paling tidak pengertian mediasi yang dikenal saat ini di Indonesia.¹

Pada pemeriksaan ditingkat penuntutan dan disidang pengadilan, Andi Hamzah (pakar Hukum Pidana) menjelaskan bahwa mediasi dapat saja dilakukan dengan

¹ Nico Setiawan, *Polisi Masa Depan*. <http://polisimasadepan.blogspot.com> diakses pada tanggal 29 November 2016 pkl. 21.02 WIB

pertimbangan kapasitas hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum..² Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan Yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat Penegak hukum mengenakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (diponir) oleh jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Berjalannya proses peradilan adalah untuk mencapai keadilan yang bukan hanya berhenti pada pemberian sanksi pidana pada pelaku sebagai pembalasan atas kerusakan yang dilakukan, akan tetapi proses peradilan diharapkan mampu untuk memulihkan kerugian yang dialami korban kepada posisi semula dimana kejahatan belum terjadi. Itulah yang kemudian menjadi idaman masyarakat dunia saat ini yang merasa tidak puas dengan sistem peradilan pidana yang ada

karena tidak memberikan ruang bagi korban untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif berbasis mediasi memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjawai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Fokus perhatian keadilan retributif yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian, jika keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan fokus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas.

Dari beberapa definisi yang ada penulis berusaha mendefinisikan mediasi sebagai sebuah konsep pencapaian keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerusakan

yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pemulihan di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi juga diri pelaku dan masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.

Tentunya konsep keadilan restoratif tidak mungkin terwujud tanpa adanya upaya mediasi, upaya mediasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya yang menggunakan konsep keadilan restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu upaya memicu proses *reintegrasi* antara korban dan pelaku, sehingga kesepakatan tersebut dapat berbentuk sejumlah program seperti reparasi (perbaikan), *restitusi* ataupun *community service*.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebenarnya upaya keadilan restoratif memungkinkan untuk dilaksanakan. Kewenangan *diskresi* kepolisian misalnya, dapat digunakan untuk melakukan *diversi* (pengalihan) yaitu proses pengalihan perkara pidana dari sistem peradilan pidana ke proses *informal*. Akan tetapi upaya ini jarang untuk dilakukan karena berbenturan dengan asas kepastian hukum kaitannya dengan *law enforcement*.

Melihat kasus penganiayaan yang dilaksanakan di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini penulis berpendapat bahwa mediasi ini tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia karena penganiayaan merupakan delik umum. Penganiayaan yang terjadi merupakan penganiayaan yang direncanakan yang termasuk kedalam pasal 353 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut³ :

(1) *Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;*

³ KUHP dan HUHAP beserta penjelasannya: Citra Umbara, 2006, hlm. 109

- (2) *Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;*
- (3) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.*

Mediasi yang dilaksanakan di Desa Menganti merupakan cerminan bahwa masyarakat lokal masih menggunakan cara musyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana. Dalam kasus penganiayaan tersebut bisa dikatakan bahwa cara damai dirasakan lebih memberikan rasa “puas” bagi korban. Menurut penulis hal ini dapat dimaklumi karena hukum acara konvensional hanya menekankan pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Penyelesaian melalui mediasi merupakan langkah untuk mencari sebuah keadilan dengan memberikan hak-hak bagi korban untuk mengembalikan kondisi fisik maupun psikis, begitupun bagi pelaku untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat.

Proses mediasi yang dilakukan di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara hanya melibatkan pihak pelaku dan pihak korban dengan bantuan mediator. Mediator

disini diambil dari kesepakatan para pihak yaitu bapak Bisri yang merupakan ustad setempat yang diutus sebagai mediator. Mediator disini hanya menjembatani keinginan antara pihak pelaku dengan korban.

Dari pihak korban yang menginginkan ganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pihak pelaku menginginkan ganti kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akhirnya mediator menawarkan untuk ganti kerugian sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena mediator melihat luka cukup parah yang dialami oleh korban. Korban sendiri merupakan tulang punggung keluarga, dengan sakit yang diderita membuat korban tidak bisa menafkahi keluarganya. Maka dari itu mediator menetapkan ganti kerugian untuk perawatan dan pengobatan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi

Dalam hukum pidana islam tindak pidana atau yang sering disebut dengan jarimah terbagi dalam tiga macam, yaitu: (1) *Jarimah Hudud*, yaitu tindak pidana yang ketentuan dan sanksinya merupakan hak Allah yang sudah ditetapkan oleh Syara'⁴; (2) *Jarimah Qishash* dan *Diyat*, yaitu jarimah untuk delik pembunuhan dan pelukaan; dan (3) *Jarimah Ta'zir*, adalah *jarimah* yang belum ada ketentuannya dalam *syara'*.

Tindak pidana penganiayaan masuk dalam *jarimah qisash* dan *diyat* yang didalamnya terdapat ketentuan *qisash* sebagai hukuman pokoknya, hukuman pengganti atau *diyat*, dan pemaafan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 178:

⁴ Syara' dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
 الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih”.

Setiap jarimah yang terjadi baik itu sengaja, tidak sengaja dan semi sengaja, semuanya akan berakibat adanya korban yang menderita materiil dan non-materiil. Dalam Islam hukuman bagi pelaku jarimah telah banyak diterangkan

dalam al-Qur'an seperti jarimah penganiayaan telah jelas diterangkan dalam surat al-Mai'dah 45 dimana setiap bentuk pelukaan akan dibalas dengan qisas yang sama. Dalam asas-asas hukum pidana Islam tindak pidana atau Jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau Jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi hukuman niat, cara, korban, dan tabiat.

Hukum Pidana Islam memandang jiwa manusia tidak hanya memiliki dimensi publik, namun juga dimensi keperdataan. Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya menyangkut masalah pidana maupun perdata saja. Hukum Islam pun tidak membedakan secara tajam keduanya.⁵ Sistem ini berbeda dengan sistem hukum yang dianut sekarang ini, yang membedakan secara tajam antara hukum pidana dan perdata dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana, meskipun dalam hukum positif belum ada pengaturannya.

⁵ Daud Ali, 1996. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm 36

Pengkajian tentang medias akan memiliki makna lebih apabila dalam kajiannya juga melihat dari nilai-nilai ajaran Islam, karena syariat Islam bersifat *Syammil-kamil-mutakammil* (menyeluruh, sempurna, dan saling menyempurnakan).⁶ Penyelesaian melalui mediasi dalam perkara pidana dalam hukum Islam memang tidak diatur secara tersurat. Perkara atau perselisihan yang terjadi sesama muslim, ditekankan untuk diselesaikan dengan jalur Perdamaian. Hal ini tercantum dalam al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam seperti dalam surat al-Hujaraat /49:9-10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

⁶ Salim Seggaf Al Jufri dalam Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jamaatul Muslimin*, Jakarta: Rabbani Press, 1993. hlm xvii

Artinya: dan jika ada kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain maka tinda kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.(Q.S Al Hujarat:9-10)

Hamka dalam Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Ketika terjadi dua golongan orang yang sama beriman dan keduanya berkelahi, dalam ayat ini disebut iqtatalu yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu.⁷

Dalam ayat 10, yang masih berkaitan dengan ayat 9, Hamka menambahkan bahwa pangkal dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan.⁸ Hubungan persaudaraan ini,

⁷ Hamka, Tafsir Al Ahzar Juz XXVI, 1984, Surabaya : Pustaka Islam, hlm 23

⁸ Hamka, Ibid. Persaudaraan ini diterjemahkan Hamka, sebagai ikatan iman kepada Allah meskipun tidak satu keluarga. Sehingga persaudaraan ini

diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat Rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.⁹

Menurut pendapat penulis, bahwa di dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan korban kejahatan dan kepentingan pelaku kejahatan harus dipertimbangkan secara seimbang, dengan demikian rasa keadilan masyarakat bisa tercapai. Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman qisas dan tidak dapat pula diukur dengan diyat yang ditetapkan, dikenakan lain seperti di penjara untuk masa tertentu yang berimbang dengan kejahatannya.

Asas kepastian hukum kemudian melahirkan hukuman bagi pelaku penganiayaan lebih bersifat *retributif*, yaitu mengartikan pemidanaan sebagai hal yang mutlak dengan

digunakan sebagai pemahaman akan penyelesaian konflik antar sesama muslim

⁹Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah* Volume 13, 2002, Jakarta : Lentera Hati, hlm 247

menyertakan unsur derita yang harus ada sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan. Penerapan sanksi yang bersifat *retributif* inilah yang kemudian dianggap mengabaikan kepentingan korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang telah diterima atas terjadinya tindak pidana.

Berbeda dengan hukum konvensional yang menempatkan korban secara pasif dalam tindak pidana penganiayaan, hukum islam memandang tindak pidana penganiayaan sebagai perkara yang didalamnya terdapat unsur keperdataan yang menempatkan korban memiliki ruang yang sangat luas untuk menentukan penyelesaian perkara pidana. Korban memiliki kewenangan untuk melakukan upaya restoratif dan menentukan sanksi apa yang akan di berikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan guna memulihkan kerugian yang telah dialaminya.

Upaya restoratif hukum islam dalam tindak pidana penganiayaan adalah dengan melibatkan korban atau dalam hal ini keluarga korban, pelaku, serta mediator (juru damai)

sebagai representasi dari masyarakat untuk proses mediasi dan eksekusi. Keluarga korban sebagai orang yang terkena dampak secara langsung atas terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi terhadap pelaku berupa *qishash*, *diyat*, ataupun pemaafan tanpa *diyat* sekalipun. Pelaku dalam hal ini sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan diharuskan memiliki kerelaan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi permintaan dari korban, hakim disini sebagai representasi masyarakat dapat bertindak sebagai mediator dan pengawas bahkan pelaksana eksekusi jika dalam musyawarah tersebut korban menginginkan dilaksanakan hukuman *qishash*.

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal oleh orang arab pada masa jahiliyyah. Hakamlah yang harus didengar pendapatnya.

Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakim. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan Arab adalah tentang siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lain.

Pada ayat al-Qur'an Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat tahkim yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat *konsensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan tempat bagi korban. Secara normatif keberadaan KUHP, memang dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi secara sosiologis, keberadaannya menimbulkan masalah. Hal ini dapat dipahami, oleh karena KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia tidak berakar dari nilai-nilai dan norma asli Indonesia.

Pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana oleh korban dan permintaan maaf pelaku kepada korban, merupakan bentuk pengabdian seorang makhluk kepada

khaliq-Nya, yang pengaturannya sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Al-qur'an melegalkan korban kejahatan untuk melakukan pembalasan kepada pelaku. Sungguhpun demikian, memaafkan dan mengadakan perdamaian, lebih mulia dari pada melakukan pembalasan (al-Qur'an, As-Syuraa: 40). Mengacu pada al-Qur'an, As-Syuraa:40, menurut hukum Islam, penyelesaian kasus pidana dapat dilakukan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Memposisikan kembali korban tindak pidana sebagai subyek hukum dapat dilakukan dengan cara melegalkan mereka untuk menentukan diproses atau tidaknya pelaku kejahatan. Harapan demikian yang harus dianggap sebagai sesuatu yang logis, oleh karena korbanlah yang merasakan akibat langsung tindak pidana.

Perdamain yang diterapkan di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara lebih mengedepankan menyelesaikan sengketa melalui jalan musyawarah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam Quran surat Al Hujarat ayat 9-10. Jalan musyawarah dianggap lebih mengedepankan kepentingan kedua belah pihak. Dengan cara

mediasi dalam menyelesaikan sengketa dengan mendatangkan mediator sebagai penengah membuat keinginan korban dan pelaku dapat tersampaikan dengan baik melalui seorang mediator. Proses mediasi ini lebih mengedepankan berperannya para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada suatu etika baik dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan hasil kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Mediasi menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan masalah tindak pidana penganiayaan di Desa Menganti. Melihat kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Menganti, bahwa perkara diselesaikan melalui mediasi dengan hanya melibatkan pelaku, korban dan pihak ketiga yang dipercayai bisa membantu menyelesaikan sengketa. Dan pihak ketiga tersebut dinamakan mediator yang diutus bukan dari pihak yang berwenang. Mediasi pidana sebenarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang ada hanya beberapa regulasi tersirat, yang membuka kemungkinan mediasi. Walaupun ada Pasal 82 KUHP, pasal ini belum menggambarkan secara tegas kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku pidana dengan korban. Tetapi dalam praktik, sudah sering diterapkan hakim. Mungkin karena ini

dipandang sebagai cara terbaik menyelesaikan masalah dengan cepat dan biaya ringan.

2. Pelaksanaan mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Desa Menganti merupakan kesepakatan antara korban dan pelaku. Hal ini sebagaimana dalam Hukum Islam apabila sudah adanya pemaafan dari korban maupun keluarganya maka penjatuhan hukuman pun tidak dilaksanakan. Namun hal ini tidak semata-mata perkara penganiayaan tersebut selesai. Bagi pelaku memiliki tanggung jawab untuk menunaikan syarat-syarat yang diberikan korban kepada pelaku. Yakni diantaranya bisa berupa ganti kerugian. Perdamaian merupakan suatu yang di izinkan selama tidak di manfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk mencapai dan perwujudan perdamaian sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam Islam. Mediasi dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *Shulhu/Ishlah*, artinya adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang kita pahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu

persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian.

B. Saran

Mediasi sudah semestinya dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi, sebagaimana telah dipraktekkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syukur, Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Adam Gaycar, Dalam *Australian Institute of Crimonology, trends and Issues in crime and criminal justice, Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219, Pebruari 2002, hal.2-3. <http://www.aic.gov.au>.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana , Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 6. Cet. Ke. 11. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta.

Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*, cetakan kedua, Sinar Grafika: Jakarta.

Citra, Nur Azizah, 2011. Skripsi, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sulselbar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie - Publishing, Depok,

Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, *Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar).

I Made Agus Mahendra Iswara, “Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Denpasar”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2011,

-----, “Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, Tesis, Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul, 1992.

Mas Achmad Santoso, *Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia, Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Bidang Lingkungan, Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Depkeh, Semarang, 10-13 April 1999.*

Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution (ADR), Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, makalah workshop, Jakarta, 18 Maret 2007.

Mudzakkir, *Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2001.

Mulyadi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997

Nawawi Arief, Barda. *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 2001.

Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharata Niaga Media, 1996.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Suteki, *Kedudukan Sociological Jurisprudence dalam Ilmu Hukum, Media Hukum* Vol. IX Nomor 2 April-Juni 2009. Semarang UNDIP, 2007.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Siar Grafika, 1996.

Zulfa, Eva Achjani, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pembuat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Daftar Riwayat Hidup

I. Data Pribadi

Nama : Muhammad Yusuf
Jenis kelamin : Laki – laki
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 12 Desember 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : Rt/Rw 08/02, Desa Menganti, Kec.
Kedung, Kab. Jepara (Jawa Tengah)
Golongan darah : O
HP : 082220621957
E-mail : yusuf.kbr137@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Sunarto
Ibu : Tuginah

II. Pendidikan

1999 - 2005 : MI DARUL HIKMAH
2005 - 2008 : MTS DARUL HIKMAH
2008 - 2011 : MA DARUL HIKMAH
2011 - : UIN WALISONGO SEMARANG

III. Pengalaman Organisasi

1. PMII
2. KMJS (Komunitas Mahasiswa Jepara Semarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Februari 2017

Muhammad Yusuf
NIM: 112211053